

**KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Shalahuddin Alif Dimasyqi

NPP.30.0216

*Asdaf Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat*

*Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: [alifdimasyqi06@gmail.com](mailto:alifdimasyqi06@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Drs. Haryanto, M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** *The performance of civil servants in the Social Service, Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in the distribution of social assistance for the Family Hope program in Dharmasraya Regency in carrying out their duties and functions has not been maximized. **Purpose:** this research is to find out and analyze how the performance of the state civil apparatus, the obstacles they face, as well as any efforts to overcome obstacles in the distribution of social assistance to the family hope program. **Method:** used in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used is the triangulation technique which consists of interviews, documentation, and observation. Meanwhile, the data analysis technique that the authors use is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** this research shows that the performance of civil servants in the Social Service, Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in the distribution of social assistance for the family of hope program in Dharmasraya Regency in carrying out their duties and functions has not been maximized. Due to the lack of number of apparatus and the quality of capabilities of the State Civil Apparatus for Social Service, Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Dharmasraya Regency which resulted in a lack of maximum distribution of social assistance for the family of hope program. **Conclusion:** This research is expected to be able to support quality improvement to achieve these tasks and functions. Researchers suggest an increase in the number and quality of State Civil Apparatus which is useful for facilitating overcoming social problems in Dharmasraya Regency.*

**Keywords :** *civil servant, Performance, Distribution, program keluarga harapan*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kinerja aparatur sipil negara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum terlalu maksimal. **Tujuan:** penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja aparatur sipil negara, kendala yang dihadapi, serta upaya apa saja untuk mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan. **Metode:** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik triangulasi yang terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara itu, teknik analisis data yang penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur sipil negara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum terlalu maksimal. Karena kurangnya jumlah aparatur dan kualitas kemampuan dari Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menyebabkan kurang maksimal dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan. **Kesimpulan:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang perbaikan kualitas untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut. Peneliti menyarankan adanya penambahan jumlah dan kualitas Aparatur Sipil Negara yang berguna untuk mempermudah mengatasi permasalahan sosial di Kabupaten Dharmasraya.

**Kata Kunci :** Aparatur Sipil Negara, Kinerja, Penyaluran, Program Keluarga Harapan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar sekaligus negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau paling banyak. Jumlah pulau di Indonesia diperkirakan berjumlah 17.504 pulau. Jumlah tersebut masih diperkirakan dapat bertambah, karena diduga masih banyak pulau yang belum terhitung. Selain menjadi negara kepulauan terbesar, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 275,77 juta jiwa.

Badan Pusat Statistik mencatat dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 275,77 juta jiwa di tahun 2022, 26,16 juta jiwanya merupakan penduduk miskin. Banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut, membuat pemerintah Indonesia harus bergerak dengan cepat dan tanggap agar dapat mewujudkan tujuan negara yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang diantaranya menyebutkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Masyarakat miskin tidak boleh hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah dan dari orang yang tergolong tidak miskin (kaya), tetapi masyarakat miskin harus mempunyai upaya atau tindakan untuk keluar dari zona kemiskinan itu sendiri, sehingga komitmen pemerintah dan masyarakat akan sejalan dalam upaya menanggulangi kemiskinan tersebut. Di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk lanjut

usia (Lansia) berumur 70 tahun ke atas dan BLT disabilitas sebesar 2,4 juta rupiah dalam setahun bagi mereka yang telah terdata oleh Kementerian Sosial (Anggraeni, 2021). Pelaksanaan PKH di daerah dilaksanakan oleh dinas sosial pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani bantuan sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.

Dinas sosial mempunyai tugas melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pasal 31 ayat (1) dan (4)). Berdasarkan prasurvei peneliti penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Dharmasraya dimulai pada tahun 2017 yang diterapkan pertama kali pada 5 (lima) kecamatan dengan sasaran awal Terkait harapan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara adalah kinerja andal yang diberikan dalam pelayanan publik. Didalam prasurvei yang dilakukan peneliti, dilihat dari jumlah ASN sangat tidak memadai, Perbandingan jumlah ASN dalam menangani pelayanan umum berbanding jauh dengan KPM PKH. data yang bersumber dari salah satu pegawai Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya melalui wawancara via WhatsApp (7 November 2022), menjelaskan perbandingan antara SDM yang tersedia untuk melakukan berbagai macam kegiatan mulai verifikasi data sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan tidak sebanding. Didalam prasurvei yang dilakukan peneliti dengan salah satu pegawai Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya melalui wawancara via WhatsApp (10 November 2022), dijelaskan juga masih terdapat warga masyarakat KPM yang terkendala dalam pencairan dana PKH dikarenakan beberapa alasan yang mempengaruhi angka realisasi di setiap tahunnya..

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berkaitan dengan kesenjangan masalah yang diambil pada penelitian ini diantaranya, kinerja aparatur sipil negara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum terlalu maksimal. Karena kurangnya jumlah aparatur dan kualitas kemampuan dari Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kabupaten Dharmasraya yang menyebabkan kurang maksimal dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Siti Ulfah (2018) yang berjudul “*Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Sosial Kota Samarinda*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kualitas kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Sosial Kota Samarinda masih kurang optimal, masih terdapat Aparatur Sipil Negara dalam pembuatan laporan kurang lengkap dalam pengerjaannya dan juga ditemukan Aparatur Sipil Negara tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, kurang pandai dalam pengoperasian computer.

Penelitian kedua yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Muhammad Nursal (2019) yang berjudul “*Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja pegawai yang

dijalankan dalam pengelolaan program PMKS sudah maksimal namun beberapa aspek masih dirasa kurang namun hal tersebut tidak mempengaruhi penyelenggaraan program PMKS secara signifikan.

Penelitian ketiga yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Cahyo Sasmito (2019) yang berjudul “*Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan Pendamping PKH, dan Peserta PKH

Penelitian keempat yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Surya Akbar (2018) yang berjudul “*Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM) didalamnya. Selain itu pola kepemimpinan serta sistem manajemen yang baik dapat mempengaruhi lingkungan kerja bagi anggota organisasi didalamnya.

Penelitian kelima yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Robert Fransiska (2018) yang berjudul “*Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi, kedisiplinan, dan kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Hersey, Blanchard Dan Johnson dalam Wibowo (2017) dengan indikator kinerja yaitu, 1) tujuan; 2) standar; 3) umpan balik; 4) motif; 5) alat dan sarana; 6) kompetensi; 7) peluang.

#### **1.5 Tujuan**

Mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, dan juga mengetahui faktor penghambat, serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambatnya.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kinerja yang di kemukakan

oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam Wibowo (2017) dengan indikator: tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Dharmasraya, Pendamping Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya**

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Kabupaten Dharmasraya dan telah mendapatkan data dari lokasi penelitian kemudian menuangkan hasil penelitian sekaligus dengan pembahasannya. Peneliti juga telah melaksanakan wawancara terhadap beberapa informan yaitu: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Dharmasraya, Pendamping Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Wibowo menjelaskan terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: tujuan, standar, umpan balik, alat dan sarana, kompetensi, motif, peluang. Indikator tersebut yang digunakan untuk melihat bagaimana kinerja aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dalam mengurangi kemiskinan.

##### **3.1.1 Tujuan**

Karena kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sangat susah yang dialami oleh masyarakat. Kualitas dari aparat pemerintah yang berwenang perlu diperhatikan. Kualitas layanan menjadi indikator karena banyaknya pandangan negatif dari masyarakat yang terbentuk mengenai pelayanan yang diberikan kepada organisasi publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator ketidakpuasan publik terhadap pelayanan. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kerja birokrasi publik. Keuntungan utama digunakan untuk kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat yang tersedia dengan mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat diperoleh dengan media massa maupun diskusi publik. Menurut Bapak Martin Efendi, HS.S.Hut.M.M selaku Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, melalui wawancara pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 09.00 WIB beliau menjelaskan bahwa:

Dalam menjalankan tupoksi tugasnya, hal yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya, kami dari pihak Dinas Sosial sendiri selalu berusaha untuk

meningkatkan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat sesuai standar kinerja agar masyarakat puas dalam pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya Dinas Sosial, sehingga tercapainya tujuan yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kemudian dari informan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 11.20 WIB menyatakan bahwa:

Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, tentunya saya harus merencanakan pelayanan sebaik-baiknya sesuai standar kinerja, harus detail kalau bisa jangan sampai ada kesalahan yang sampai merugikan masyarakat. Jika masyarakat mengeluh atas pelayanan yang kami berikan, kami dengan senang hati langsung merespon bila ada laporan atau keluhan dari pelayanan kami. Karena dengan seperti itu, kami bisa mengetahui kekurangan kami dan kami akan meningkatkan pelayanan terutama pelayanan terkait bantuan sosial PKH ini karena itu tujuan dari pelayanan yang kami lakukan.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber Ibu Zelfa Mustika, S.Pd selaku Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Dharmasraya, yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.55 WIB yang mengemukakan bahwa:

Banyak permasalahan yang timbul akibat tidak koordinasi dari warga masyarakat penerima bantuan sosial kepada aparaturnya yang bertugas, permasalahannya antara lain: pergantian pengurus karena yang bersangkutan meninggal, buku tabungan atau ATM hilang atau rusak, waktu pencairan tidak ada di tempat, pindah alamat, KPM sudah dikeluarkan atau grafuasi namun namanya masih ada dalam daftar penerima, anaknya sudah naik SMP tapi masih tercatat di SD padahal sudah diusulkan jumlah bantuan anak SD dan SMP berbeda, ada juga ibu hamil yg sudah melahirkan tercatat masih hamil, seharusnya yang bersangkutan punya anak balita baru.

Berdasarkan dari ketiga hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial tentu sangat ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya sudah mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam melayani masyarakat, dan mengetahui apa saja yang diinginkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya terutama pelayanan untuk bantuan sosial sendiri. Umpan balik atau masukan sangat diperlukan, apakah sudah sesuai standar kinerja dan tujuan dari pelayanan bantuan sosial itu sudah tercapai.

### **3.1.2 Standar**

Dalam salah satu indikator kinerja ini ada standar yang dimana pengertian standar merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah tujuan tersebut dapat dicapai. Maka dari itu, standar yang dimaksud dijadikan tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kinerja. Kinerja disebut berhasil apabila telah mencapai target yang telah ditentukan oleh atasan dan bawahan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sri Lestari, SE selaku Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 11.40 WIB, mengatakan bahwa:

Sebelum kami melakukan penyaluran bantuan, penerimanya harus yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) terlebih dahulu. Setelah terdaftar di DTKS maka itu akan disaring lagi secara ekonominya dengan pihak Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya. Dengan seperti itu, hasil saringan tersebut akan kami laporkan kembali ke Pemerintah Provinsi yang nantinya diteruskan ke Pemerintah Pusat. Bantuan langsung tunai tersebut langsung dari Pemerintah Pusat, yang diteruskan ke bank masing-masing penerima bersama dengan pendamping

untuk mengambil bantuan tersebut.

Selain itu, menurut Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 11.20 WIB, mengatakan bahwa:

Kami melayani bantuan sosial PKH berdasarkan data yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dimana data tersebut yang sudah didata melalui pusat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena aturan yang menetapkan pemerintah pusat, dari kami pun hanya membantu pendataan dan verifikasi dari data tersebut dalam penyaluran bantuan sosial.

Dari hasil wawancara peneliti bersama informan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial PKH sendiri pun tidak mempunyai standar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dikarenakan program ini berasal dari Pemerintah Pusat langsung, pihak Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya sendiri hanya melakukan pendataan kepada masyarakat yang terdaftar dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). SOP sendiri langsung diverifikasi ke penerima bank masing-masing. Standar ukuran kinerja dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini juga tergantung kepada pencapaian target diawal perencanaan dan sesuai aturan yang berlaku yaitu aturan pemerintah pusat.

### **3.1.3 Umpan Balik**

Umpan balik sangat dibutuhkan sebagai bentuk masukan yang digunakan dalam mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Melalui umpan balik biasanya dilakukan evaluasi terhadap suatu kinerja sehingga dapat memperbaiki kualitas kinerja kedepannya. Umpan balik berasal dari faktor luar organisasi dan faktor dalam organisasi. Oleh karenanya, dalam hal pelaksanaannya penyaluran bantuan sosial PKH umpan balik kemungkinan besar untuk didapatkan karena objek dan subyek yang dilayani merupakan masyarakat dan lingkungannya yang adalah tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Justru harusnya masyarakat lebih harus aktif dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar selaku manusia adalah makhluk sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Masukan untuk kemajuan kinerja sangat perlu dilakukan agar penyaluran bantuan sosial PKH berjalan dengan baik. Penyaluran bantuan sosial yang baik akan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap kinerja aparatur sipil negara yang telah dilakukannya. Permasalahn terkait realisasi PKH tahun 2020 dan 2021 yang tidak tersalurkan dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya warga masyarakat KPM yang terkendala dalam pencairan dana PKH dikarenakan beberapa alasan yang dapat dilihat pada tabel diatas. Pada tahun 2020 ada sebanyak 98 KPM yang tidak tersalurkan dan pada tahun 2021 ada sebanyak 22 KPM yang tidak tersalurkan. Hal ini tidak terlepas dari usaha dari berbagai pihak, baik itu aparatur sipil negara maupun masyarakat penerima bantuan sosial PKH dalam pencapaian indikator kinerja.

### **3.1.4 Alat dan Prasarana**

Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya kalau berbicara terkait sarana prasarana sejauh ini sudah cukup baik. Karena dapat dilihat dari tabel sarana dan prasarana yang dimiliki. Dan juga walaupun ada beberapa komputer yang mengalami kerusakan sudah kita data dan kita laporkan untuk terkait perbaikan atau pengadaan baru. Mengenai kendaraan sudah cukup untuk menunjang dalam menjalankan pekerjaan. Intinya perlu pendataan dan pelaporan yang jelas agar aset kantor dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martin Efendi, HS.S.Hut.M.M selaku Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, beliau menyatakan bahwa:

Untuk sumber daya berupa sarana dan prasarana sendiri di Dinas Sosial cukup terpenuhi untuk melakukan pelayanan dalam pendataan penyaluran bantuan sosial sendiri. Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya akan selalu meningkatkan dan merawat sarana dan prasarana agar dapat bekerja secara maksimal.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 11.20 WIB, beliau menyampaikan bahwa:

Untuk sumber daya berupa sarana dan prasarana sendiri menurut saya sudah benar-benar tercukupi. Karena kami selalu mendata apa saja yang dibutuhkan untuk pelayanan kepada masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya. Untuk masalah sosial pasti akan menjadi tanggungjawab pihak Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bahkan dalam permasalahan penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber daya dalam bentuk sarana dan prasarana sangat dibutuhkan sebagai faktor penunjang keberhasilan tercapainya suatu kegiatan namun didalam daftar barang inventaris yang sudah diperlihatkan pada tabel 4.4 sarana penunjang pelayanan untuk masyarakat yang sering digunakan sehari-hari yaitu komputer/PC dan printer.

### **3.1.5 Kompetensi**

Pegawai di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya mayoritas memiliki latar belakang pendidikan terakhir adalah S1. Dalam hal ini dapat dilihat dari kompetensi yang dimiliki para pegawai sudah mampu dalam menjalankan tugasnya secara tupoksi. Hal ini, dikarenakan banyaknya pegawai yang menempuh pendidikan sarjana sehingga mempengaruhi dengan kompetensi dari pegawai itu sendiri. Pemimpin harus dapat mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya agar berjalan sesuai dengan rencana. Jika kita amati memang kurang mencukupi untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dibutuhkannya pegawai sesuai dengan standar yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Martin Efendi, HS.S.Hut.M.M selaku Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, beliau mengatakan bahwa:

Latar belakang pendidikan aparatur Dinas Sosial saat ini belum sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena saya sudah menempatkan posisi pekerjaan mereka, maka mereka harus dapat menyesuaikan dengan skill dan pendidikan mereka terakhir walaupun berbeda dengan bidangnya. Saya melakukan hal itu, karena sulit mencari pegawai yang sesuai antara latar pendidikan dengan jabatan yang diemban. Kami juga sesungguhnya keterbatasan pegawai untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial apalagi soal dengan memisahkan DTKS yang ada, staf kami keteteran karena yang mengerjakannya hanya sendiri, sedangkan DTKS jumlahnya ribuan dan itu harus dipisahkan lagi sesuai dengan kategori bantuan yang telah di data penerima bantuan sosial tunai maupun non tunai di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Selly Tri Marni, SE selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Kompetensi aparatur disini sudah cukup baik walaupun latar belakang pendidikan berbeda dengan



bidang yang ditekuni. Walaupun begitu aparatur dan staf bisa lambat laun membaaur dengan beban kerja yang diterima saat ini, hanya beberapa orang saja yang tidak mengerti dalam proses pekerjaannya. Biasanya jika itu terjadi, bila Saya maupun Pimpinan mendapatkan informasi ada sosialisasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah, saya mengikutkan staf saya untuk menambah soft skill mereka yang bertujuan untuk menambah ilmu mereka. Agar aparatur Dinas Sosial dapat bekerja secara berkompeten. Sebenarnya kami kekurangan pegawai, karena untuk pendataan kepegawaian dan sebagainya pun memakan waktu dan tenaga apalagi jumlah personil yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya sendiri saja masih kurang, makanya terkadang saya dan rekan-rekan lainnya saling membantu bila ada pendataan yang ada di dinas.

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bisa dapat tercapai secara maksimal bila dilihat dengan jumlah sumber daya manusia yang ada dan tupoksi pegawai Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dengan latar belakang pendidikan terakhir Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya sendiri pun juga sudah tercukupi tetapi belum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Akan tetapi, Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya terus memberikan yang terbaik terhadap pegawainya dengan memberikan pelatihan dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas kinerja. Harapan dari adanya pelatihan tersebut terciptanya sumber daya manusia yang memadai dan juga dapat mengatasi segala persoalan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Hanya saja, di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya dalam hasil wawancara tersebut, keterbatasan jumlah sumber daya manusia.

### **3.1.6 Motif**

Banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja dilandasi dengan motif dan alasan tertentu yang membuat mereka mau untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Alasan tersebut menjadi hal yang sangat mendasar bagi para pegawai untuk bekerja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Ibu Sri Lestari, SE selaku Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda. Kesimpulan yang diambil oleh Peneliti dari kedua hasil wawancara tersebut adalah aparatur sipil negara Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya mempunyai tujuan dalam bekerja dengan memenuhi tugas dan tanggungjawab dan memiliki alasan memperbaiki kualitas kerja yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Untuk mendapatkan *reward* tersebut, juga harus lebih meningkatkan kinerja bekerja. Untuk *punishment* belum ada diberikan karena aparatur sipil negara sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku.

### **3.1.7 Peluang**

Peluang yang dimaksud dalam indikator kinerja yang terakhir adalah kesempatan yang diperoleh dari atasan kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan prestasi kerjanya. Hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, kesempatan yang diberikan aparatur adalah memberikan masukan ataupun saran kepada pimpinan tetapi bukan untuk menilai pimpinan melainkan memberikan inovasi atau masukkan baru kedalam tugas penyaluran yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif, agar tidak membuang waktu di lapangan.

Hasil dari ketiga wawancara tersebut, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menyampaikan masukan dan juga saran yang baik kepada Pimpinan yang bertujuan untuk memberikan inovasi yang sifatnya membangun kinerja aparatur sipil negara Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya dalam menangani penyaluran bantuan sosial tunai maupun non tunai.

## **3.2 Faktor Penghambat Kinerja Aparatur Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan**

### **3.2.1 Masih Terdapatnya Bantuan Sosial PKH yang Belum Diterima Oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat memiliki kendala dalam hal masih terdapatnya bantuan sosial yang belum tersalurkan. Banyak kendala tersebut terjadi karena beberapa alasan. Setelah peneliti terjun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan Ibu Zelfa Mustika, S.Pd dan kepada Bapak Andi Putra, S. Hi selaku Pendamping Program Keluarga Harapan

Berdasarkan pendapat narasumber dijelaskan bahwa perlu adanya kerja keras dari aparatur yang bekerja dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini karena tidak semua warga masyarakat yang mengerti, serta perlu juga ada masukan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai pelayan masyarakat.

### **3.2.2 Masih Rendahnya Kompetensi Petugas dalam Pelayanan**

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya dapat terkendala oleh tingkat pendidikan aparatur sipil negara yang bekerja. Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap kompetensi. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Martin Efendi, HS.S.Hut.M.M selaku Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan pendapat narasumber dapat disimpulkan bahwa kompetensi sangat mempengaruhi dari segi kinerja. Walaupun jika dilihat dari segi dengan latar belakang pendidikan terakhir Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya sendiri pun juga sudah tercukupi tetapi belum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kemampuan aparatur dalam pelayanan.

### **3.2.3 Jumlah Sumber daya aparatur yang terbatas**

Sumber Daya Aparatur pada saat sekarang ini sangat dibutuhkan. Dalam penyaluran bantuan sosial PKH terdapat beberapa proses tahapan sehingga dalam setiap proses tersebut diperlukan aparatur dalam jumlah yang cukup. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dwi Andayani, S.Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada 10 Januari 2023 yang menyatakan bahwa: maka perbandingan antara SDM yang tersedia untuk melakukan berbagai macam kegiatan mulai verifikasi data sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan tidak sebanding. Idelanya dalam sebuah pendampingan maksimal 1 orang melakukan pendampingan sebanyak 250 KPM, agar dalam proses verifikasi data, pendampingan penyaluran, pembinaan KPM dan kegiatan lainnya bisa maksimal.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kurangnya jumlah SDM aparatur sangat mempengaruhi dalam efektivitas bekerja. Maka perlu adanya penambahan aparatur sehingga pekerjaan menjadi efektif dan efisien.

### **3.3 Upaya yang Ditempuh Oleh Pimpinan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya dalam Penyaluran Bantuan Sosial PKH**

#### **3.3.1 Membuat Jadwal Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara Terpadu**

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa kendala dan hambatan sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Permasalahan terjadi karena faktor eksternal maupun internal.

Pernyataan tersebut didukung saat peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada Ibu Zelfa Mustika, S.Pd selaku Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Dharmasraya 12 Januari 2023 yang menyatakan bahwa: Banyak permasalahan yang timbul akibat tidak koordinasi dari warga masyarakat penerima bantuan sosial kepada aparatur yang bertugas, permasalahannya antara lain: pergantian pengurus karena yang bersangkutan meninggal, buku tabungan atau ATM hilang atau rusak, waktu pencairan tidak ada di tempat, pindah alamat, KPM sudah dikeluarkan atau grafuasi namun namanya masih ada dalam daftar penerima, anaknya sudah naik SMP tapi masih tercatat di SD padahal sudah diusulkan jumlah bantuan anak SD dan SMP berbeda, ada juga ibu hamil yg sudah melahirkan tercatat masih hamil, seharusnya yang bersangkutan punya anak balita baru.

Mengatasi permasalahan yang dijelaskan diatas tersebut, pimpinan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya mengambil langkah preventif dengan mengatur jadwal penyaluran bantuan sosial PKH secara terpadu. Pernyataan tersebut didapat oleh peneliti yang melakukan wawancara dengan Bapak Martin Efendi, HS.S.Hut.M.M selaku Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya pada 12 Januari 2023 yang menyatakan bahwa: Pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya telah mengambil langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH.

#### **3.3.2 Peningkatan Kapasitas (*Upgrading*) Petugas dalam Pelayanan**

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH perlu adanya petugas yang memiliki kompetensi yang sesuai. Kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas (*upgrading*). Pimpinan di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya selalu memberikan kepada aparatur kegiatan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam pelayanan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Martin Efendi, HS.S.Hut.M.M selaku Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pimpinan di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan kompetensi petugas pada saat penyaluran bantuan sosial PKH.

#### **3.3.3 Mengajukan Penambahan Aparatur Kepada Bupati Dharmasraya Melalui BKPSDM Kabupaten Dharmasraya**

Hambatan atau kendala dalam penyaluran bantuan sosial PKH berupa kurangnya jumlah aparatur yang bertugas dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial PKH sangat mempengaruhi kinerja pegawai pada saat bekerja. Hal tersebut perlu diatasi dengan dilakukannya pengajuan penambahan aparatur kepada Bupati Dharmasraya melalui BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

Berkaitan dengan pengajuan penambahan aparatur kepada Bupati Dharmasraya melalui BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Martin Efendi, HS.S.Hut.M.M selaku Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya pada 12 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya telah mengajukan permohonan penambahan aparatur kepada Bupati Dharmasraya. Pengajuan ini berguna untuk peningkatan kinerja aparatur yang bekerja dalam pelayanan bantuan sosial, karena jumlah aparatur masih sedikit dan tidak memenuhi standar atau kriteria.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pimpinan di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat telah berupaya dalam mengatasi permasalahan terkait kurangnya aparatur yang bekerja dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial PKH. Diharapkan dengan adanya upaya tersebut penambahan jumlah aparatur yang bekerja dalam pelayanan bisa disetujui oleh Bupati Dharmasraya dan selanjutnya di tindaklanjuti oleh BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Siti Ulfah (2018), Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Sosial Kota Samarinda Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan dimana pada penelitian Siti Ulfah, lokus di Kota Samarinda, penelitiannya membahas tentang faktor yang mempengaruhi kinerja sedangkan peneliti membahas tentang kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan sosial.

Penelitian kedua yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Muhammad Nursal (2019) Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan dimana dari segi pengukuran kinerja menggunakan teori Dwiyanto, sedangkan peneliti menggunakan Hersey Blanchard dan Johnson. Selain itu dari segi pembahasan untuk penelitian kedua membahas kinerja aparatur dalam pengelolaan PMKS secara umum, sedangkan peneliti lebih mengarah kepada penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan kepada masyarakat miskin.

Penelitian ketiga yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Cahyo Sasmito (2019) Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan dimana pada penelitian Cahyo Sasmito, penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu, sedangkan peneliti menjelaskan tentang kinerja aparatur dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Penelitian keempat yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Surya Akbar (2018) Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan dimana pada penelitian Surya Akbar, penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM). Pola kepemimpinan serta adanya sistem manajemen yang baik mempengaruhi lingkungan kerja bagi anggota organisasi didalamnya.

Penelitian kelima yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Robert Fransiska (2018) Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa sama halnya dengan penelitian sebelumnya hasil yang didapat dari penelitian tersebut ditemukan bahwa motivasi, kedisiplinan, dan kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap prestasi kerja pegawai.

#### IV. Kesimpulan

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Dharmasraya sudah cukup baik, dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yang digunakan meliputi: tujuan, standar, umpan balik, alat dan sarana, kompetensi, motif dan peluang, 5 (lima) dimensi sudah baik yaitu: tujuan, standar, alat dan sarana, motif, dan peluang, sedangkan 2 (dua) dimensi lainnya yaitu umpan balik dan kompetensi perlu adanya perbaikan dan perubahan.

Permasalahan paling mendasar yang menjadi penghambat kinerja aparatur sipil negara dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya yaitu masih terdapatnya bantuan sosial PKH yang belum diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih rendahnya kompetensi petugas dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial PKH, dan jumlah aparatur yang bertugas dalam penyaluran bantuan sosial PKH yang terbatas.

Upaya yang ditempuh oleh pimpinan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya untuk mengatasi permasalahan dan hambatan kinerja aparatur sipil negara dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, antara lain melalui membuat jadwal penyaluran bantuan sosial PKH secara terpadu, peningkatan kapasitas (upgrading) petugas dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial PKH, dan mengajukan penambahan aparatur kepada Bupati Dharmasraya melalui BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada kinerja ASN Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya dalam mengurangi angka kemiskinan di P3APPKB Kabupaten Dharmasraya

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja aparatur Dinas Sosial P3APPKB dalam hal mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua, saudara kandung, seluruh keluarga besar serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini

#### VI. Daftar Pustaka

- Akbar, Surya. 2018. "*Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawarn*", Jurnal Administrasi Negara Vol. 3, Riau: STIA Indragiri.
- Nursal, Muhammad. 2019. "*Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*", Makassar: Skripsi.
- Robert Fransiska. 2018. "*Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya*", Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol. 5, Palangka Raya: STIE Palangkaraya.

Sasmito, Cahyo. 2019. "*Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu*", Jurnal Inovasi Sektor Publik Vol. 3, Malang: Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Ulfahi, Siti, dkk. 2018. "*Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Sosial Kota Samarinda*", Jurnal Administrasi Negara Vol. 6, Samarinda: Universitas Mulawarman.

Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

